

## **PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL: ANALISIS HISTORIS MASA DINASTI ABBASIYAH**

*Uswatun Hasanah<sup>1</sup>, Heni Verawati<sup>2</sup>*

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
[uswatunh@radenintan.ac.id](mailto:uswatunh@radenintan.ac.id), [heniverawati@radenintan.ac.id](mailto:heniverawati@radenintan.ac.id)

### **ABSTRAK**

Multikulturalisme merupakan pengakuan terhadap keragaman yang ada dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara yang multi kultur, multi etnis, juga multi agama. Meskipun demikian seakan masyarakat Indonesia kurang kesadaran dan kemampuan dalam mengelola keragaman dengan baik. Sehingga konflik dengan latarbelakang perbedaan tersebut banyak terjadi. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji konsep dasar pendidikan multiktural dengan analisis historis pada masa dinasti Abbasiyah dan mengkaji model pendidikan Islam multikultural pada masa Abbasiyah yang dapat diteladani dan diimplementasikan pada masa sekarang. Penelitian ini mengkaji konsep pendidikan Islam multikultural pada masa Dinasti Abbasiyah, yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif berbentuk studi pustaka dengan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multikulturalisme pada masa Dinasti Abbasiyah mulai berkembang karena khalifahnyanya memiliki keterbukaan akan keragaman, khususnya pada masa Harun al-Rasyid dan puncaknya pada masa al-Ma'mun. Penerapan pendidikan Islam multikultural pada lembaga Bayt al-Hikmah bersifat eksternal dan umum sedangkan di luar Bayt al-Hikmah bersifat internal dan khusus. Selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, multikulturalisme pada masa Dinasti Abbasiyah mulai berkembang, hal ini karena keterbukaan khalifah dalam menerima kebudayaan di luar Arab juga peran dari masyarakatnya. Selanjutnya pendidikan Islam multikultural masa dinasti Abbasiyah meliputi aspek kelembagaan, pendidik dan metode terbukti berhasil menanamkan nilai-nilai multikultural dan membawa Islam pada puncak kejayaan.

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Multikultural; Dinasti Abbasiyah

### **ABSTRACT**

*Multiculturalism can be considered an acknowledgment of the diversity that exists in society. Indonesia is a multicultural, multi-ethnic, and multi-religious country. Even so, it seems that the Indonesian people lack proper awareness and ability to manage this diversity as some conflicts from these differences still occur. This study aims to examine the basic concepts of multicultural education with historical analysis during the Abbasid dynasty and the model of multicultural Islamic education during the Abbasid period that can be imitated and implemented today. This study examines the concept of multiculturalism in Islamic education during the Abbasid dynasty, which was carried out using a descriptive approach in the form of literature studies and content analysis techniques. Multiculturalism during the Abbasid dynasty began to develop because the Khalifah was open to diversity, especially during the era of Harun al-Rasyid and at its peak during the era of al-Ma'mun. The application of multiculturalism in Islamic education at the Bayt al-Hikmah institution was external and general, while multiculturalism education outside Bayt al-Hikmah was internal and more specific. Furthermore, the conclusion of this study shows that multiculturalism during the Abbasid dynasty began to develop because of the caliph's openness in accepting cultures outside of Arabia and the role of the community. Furthermore, multicultural Islamic education during the Abbasid dynasty includes aspects of institutions, educators, and methods that have proven successful in instilling multicultural values and bringing Islam to its peak of glory.*

*Keywords: Islamic Education; Multiculturalism; Abbasid Dynasty*

## **PENDAHULUAN**

Keanekaragaman dalam kehidupan manusia merupakan sebuah realitas, karena manusia diciptakan oleh Tuhan disertai dengan berbagai perbedaan. Perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, budaya bahkan warna kulit menjadi bukti keragaman tersebut. Kemampuan dalam menyikapi keragaman menjadi penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik. Realitas ini kemudian dikenal dengan istilah multikultural yaitu kehidupan manusia yang diwarnai dengan keragaman (Mustaqim & Mustaghfiroh, 2013). Multikulturalisme diartikan sebagai sebuah pengakuan terhadap keragaman dan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Jika keragaman ini di kelola dan dimanfaatkan dengan baik akan membuat suatu Negara menjadi kuat, akan tetapi jika tidak disikapi

dengan benar akan menciptakan konflik-konflik yang membuat negara menjadi lemah. Berdasarkan hal tersebut maka peran pendidikan menjadi sangat penting.

Melalui pendidikan manusia terus menerus berproses mengembangkan potensi dalam diri agar mampu menjalani kehidupannya. Secara historis, wacana multikulturalisme pertama hadir di wilayah Amerika dan Negara-negara wilayah Eropa Barat. Bertujuan untuk menyerukan penghapusan tindak diskriminasi bagi warga sipil. Kemudian pada praktiknya wacana ini merambah pada lembaga-lembaga pendidikan yang pada mulanya mempraktikkan diskriminasi pada pelaksanaan kegiatan pendidikannya juga diskriminasi akibat perbedaan warna kulit. Permasalahan ini yang pada akhirnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah (Sopiah, 2017).

Lebih lanjut, wacana pendidikan multikultural ini merambah luas ke seluruh dunia dan akhir-akhir ini menjadi topik yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Karena kondisi Indonesia yang merupakan Negara multikultural, dengan semboyan *‘Bineka Tunggal Ika’*, mengisyaratkan bahwa perbedaan tidak menghalangi persatuan. Sikap ini harus ditanamkan pada setiap warna Negara Indonesia dan hal ini dapat terwujud melalui pendidikan multikultural.

Dalam prespektif Islam salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas untuk mengatur, memelihara serta menjaga bumi. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan merupakan tanggung jawab manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah. Pendidikan Islam memiliki tujuan akhir yaitu terbentuknya manusia yang sempurna (*insan kamil*) hal ini bermakna bahwa manusia tidak hanya memiliki kesalehan individu akan tetapi juga harus memiliki kesalehan sosial yang termasuk di dalamnya kemampuan mengelola multikultural dengan baik.

Pendidikan Islam harus mampu mengarahkan manusia untuk menyadari serta menerima pluralitas dan multikultural sebagai realitas dalam kehidupan. Karena sikap menerima, menghargai dan menghormati multikultural hanya akan terwujud jika manusia memiliki kesadaran diri terkait hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural seyogyanya diakomodir oleh pendidikan Islam, demi tercapainya tujuan

risalah Islam. Risalah Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil'alamin* dapat diwujudkan dengan melahirkan individu yang bersedia menjadi agen perdamaian di muka bumi ini. Oleh karena itu, seperangkat nilai-nilai multikultural harus diintegrasikan melalui pendidikan Islam sehingga akan membawa kedamaian pada peserta didiknya.

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya etnis di Indonesia. Berdasarkan hasil sensus BPS pada tahun 2010, menyebutkan bahwa kurang lebih terdapat 1.340 suku bangsa dan enam agama yang resmi di Indonesia meliputi agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buda dan Khongucu (Informasi Indonesia, 2017) Keragaman ini diakui atau tidak dapat menjadi kekuatan juga kelemahan negara. Oleh karena itu kesadaran akan kondisi multi kultural, multi agama ini harus ditanamkan pada setiap warga negaranya.

Berdasarkan fakta sejarah, Negara Indonesia berhasil terbentuk karena perjuangan rakyat Indonesia yang notabene sangat beragam. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memang hidup berdampingan dengan keanegaraman sejak awal didirikannya Negara ini, akan tetapi akhir-akhir ini keasadaran dalam menyikapi keragaman tersebut cenderung berkurang jika terkait masalah perbedaan suku, budaya dan keyakinan (Sopiah, 2017).

Realita yang terjadi banyak tindak kejahatan, penganiayaan, diskriminasi dengan latar belakang agama, fanatisme agama, suku, radikalisme, sampai terorisme, mulai banyak terjadi dan menimbulkan keresahan karena berdampak pada kesatuan dan persatuan bangsa ini. Dengan melihat realita yang terjadi maka persatuan warga Negara ini sedang diuji eksistensinya. Karena faktor-faktor penyebab perpecahan bangsa sedikit demi sedikit mampu meruntuhkan semboyan *Bineka tunggal Ika*. Contohnya sengketa yang terjadi di Ambon, konflik Papua, Poso, bom Bali, bahkan berbagai kasus bom bunuh diri dilatar belakang agama semakin hari meningkat pesat jumlahnya. Peristiwa tersebut, tentu saja menyebabkan kerugian diberbagai pihak yang berkonflik, selain merenggut banyak korban, juga melakukan perusakan ratusan rumah peribadatan (Lasijan, 2014).

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas, pendidikan Islam multikultural hadir dengan memberikan solusi dengan mengimplementasikan strategi pendidikan pada penanaman nilai-nilai multikultural dalam membangun kesadaran setiap individu agar mampu menyikapi kondisi plural di masyarakat, baik yang berhubungan langsung dengan peserta didik mulai dari jenis kelamin, suku, kebudayaan bahkan sampai pada tingkat kemampuan masing-masing peserta didik dan lain sebagainya. Dengan rumitnya permasalahan terkait keragaman budaya dan agama, maka menghindari dan menafikkan permasalahan tersebut bukanlah solusi melainkan mempersiapkan peserta didik yang mempunyai kesadaran dalam mengimplementasikan nilai multikultural dengan baik (Rois, 2013).

Jika menilik sejarah, Islam pernah mencapai puncak keemasannya yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah Islam dikenal kaya akan khazanah keilmuan, banyak tokoh-tokoh intelektual muslim, berkembang pesatnya lembaga pendidikan, tradisi ilmiah seperti diskusi dan gerakan penerjemahan buku dan lain sebagainya. Dengan tumbuh suburnya lembaga pendidikan saat itu, menandakan bahwa pendidikan Islam memang telah pada masa kejayaannya. Kuantitas lembaga pendidikan yang semakin meningkat pada era tersebut terlihat sangat dominan mempengaruhi kehidupan kaum muslim. Berbagai ilmu pengetahuan yang tumbuh lewat lembaga pendidikan itu menciptakan pembangunan, peradaban, serta pertumbuhan berbagai aspek kultur baru di kalangan muslimin yang sebelumnya belum pernah ada. (Kiki Hakiki, 2012) Khalifah pada masa Dinasti Abbasiyah yang terkenal berhasil membangun peradaban umat melalui pendidikan di tengah kondisi yang multikultur, diantaranya adalah khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun al-Rasyid dan Al-Makmun pada masa pemerintahannya Islam mencapai puncak kemajuan dan peradaban.

Penelitian tentang pendidikan Islam multikultural sebenarnya sudah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Namun kajiannya masih sebatas pada keterkaitan konsep umum dengan konsep Islam (Khotimah & Januarizal, 2017; Lasijan, 2014). Serta implementasi multikulturalisme dalam pembelajaran pendidikan agama Islam (Harto, 2014; Heriadi, 2020; Novayani, 2017). Masih sedikit penelitian yang mengkaji pada

aspek historis Islam khususnya pada masa dinasti Abbasiyah. Penelitian mengenai masa keemasan Islam ini biasanya hanya mencakup tentang kebangkitan pendidikan dan peradaban di masa itu (Ifendi, 2020; Iqbal, 2015; Mahroes, 2015; Maryamah, 2017; Nunzairina, 2020; Suriana, 2017). Lalu mengkaji tentang sistem, metode, kurikulum dan tujuan pendidikan dan model pembelajaran di masa Dinasti Abbasiyyah (Khairuddin, 2018; Wahyuningsih, 2014). Oleh karna itu, penelitian ini akan mengkaji konsep dasar pendidikan multiktural dengan analisis historis pada masa dinasti Abbasiyah dan mengkaji model pendidikan Islam multikultural pada masa Abbasiyah yang dapat diteladani dan diimplementasikan pada masa sekarang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memfokuskan pada konsep pendidikan Islam multikultural pada masa Dinasti Abbasiyah. Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*). Studi ini dilakukan dengan pengumpulan data pustaka, yang dilakukan dengan membaca, menganalisis, mencatat, mengolah, serta menyimpulkan bahan penelitian dari sumber dan penelitian yang sudah ada. Pada dasarnya studi kepustakaan tidak menggunakan data di lapangan akan tetapi melalui kegiatan analisa dan pengumpulan pengetahuan dari teks, buku, jurnal, dokumen. Sehingga data dari hasil lapangan tidak diperlukan. karena peneliti menghimpun sumber data yang ada di perpustakaan atau sumber online (Zed, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis* (kajian isi), yaitu pembahasan dengan analisis yang mendalam terkait konsep pendidikan Islam multikultural pada masa Dinasti Abbasiyah pada sumber informasi online maupun pustaka. Berdasarkan pertimbangan ini, data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian peneliti lakukan dengan mengkaji dan menganalisa beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang relevan terkait pendidikan Islam multikultural di masa dinasti Abbasiyah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Memahami Konsep Pendidikan Islam Multikultural***

Pendidikan Islam multikultural terdiri dari dua konsep yaitu pendidikan Islam dan multikultural. Pendidikan cenderung didefinisikan dengan istilah yang berbeda-beda, yakni *Tarbiyah* (bimbingan), *Taklim* (pengajaran), *Ta'dib* (mendidik), *Riyadoh* (latihan), *Tadris* (pengajaran) dan *Tazkiyah* (pembersihan/pemurnian). Semua istilah tersebut memiliki arti yang beragam, hal ini dikarenakan perbedaan konteks kalimatnya dalam penggunaan istilah tersebut. Akan tetapi dalam kondisi tertentu semua istilah itu memiliki arti yang sama, yakni pendidikan (Ma'zumi, Syihabudin, & Najmudin, 2019). Pendidikan Islam adalah usaha manusia untuk memberikan bimbingan dan pengembangan potensi yang ada dalam diri manusia, agar bisa menjalankan kehidupannya di dunia ini dengan baik dan sekaligus dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi.

Dalam mencapai tujuan tersebut maka pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pondasi pelaksanaan setiap kegiatannya dan pada dasarnya penerapan nilai-nilai multikulturalisme sejalan dengan ajaran Islam yang menjadi agama *rahmatat lil 'alamin*. Multikulturalisme diartikan dengan beragam oleh para ahli, sesuai dengan pemikiran dan latarbelakangnya masing-masing. Konsep multikulturalisme ini telah berjalan cukup baik di beberapa negara misalnya Amerika dan Australia yang telah berhasil dalam mengembangkan suatu sistem masyarakat multikultur dan membangun identitas bangsanya tanpa mengurangi atau menghilangkan kultur dari pendahulu sebelumnya. Walaupun dalam konteks tersebut multikulturalisme harus diawali dengan penyatuan seluruh budaya asal khususnya dari para imigran untuk memiliki satu budaya baru yaitu budaya Amerika yang cenderung kepada kultur kulit putih yang berasal dari Eropa, namun konsep utama mengenai penerimaan dari keberagaman budaya yang majemuk menjadi tolak ukur pertama dalam munculnya konsep kehidupan multicultural (Hasanah & Hasanah, 2021). Melalui pendidikan multikultural para peserta didik dikenalkan akan budaya dari tempat asal mereka masing-masing. Manfaatnya lebih luas sampai pada system pendidikan nasional yang mendukung penerapan nilai multikultural (Saihu, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas maka pendidikan Islam multikultural adalah pendidikan agama yang berupaya menanamkan nilai-nilai multikultural seperti *Al-Musyawah* (demokrasi), *al-musawah* (kesetaraan/persamaan) dan *al-'adl* (keadilan) dengan mengacu pada implementasi Islam sebagai agama yang *Rahmatal lil'alamin* dengan memiliki kepekaan terhadap realitas sosial, lebih mengutamakan keselamatan sosial, serta dilandasi dengan nilai-nilai persatuan dan keadilan seperti yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis sehingga peserta didik mampu menerima, mengakui dan menghargai perbedaan orang lain. Tujuannya untuk membentuk manusia yang memiliki kesalehan individu dan kesalehan sosial yang mampu membangun pemahaman beragama yang inklusif dan menciptakan kerukunan antarumat beragama (Rois, 2013).

### ***Pendidikan Islam Multikultural dalam Perjalanan Sejarah Islam***

Bangsa Arab merupakan bangsa yang multikultur hal ini dibuktikan dengan adanya keragaman etnis yang menganut sistem kabilah disertai keragaman budaya dan kepercayaan yang mereka anut. Kondisi seperti ini terus terjadi sampai Islam datang. Pada masa Nabi Muhammad SAW, berbagai upaya dilakukan untuk menyampaikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab dengan kultur, etnis dan kepercayaan yang berbeda ini, sehingga sebenarnya Islam dan multikulturalisme telah berkembang sejak masa Nabi. Selanjutnya proses multikulturalisme terus bertambah sampai pada masa kejayaan Islam (Abdurahman, 2016).

Pada awal sejarah Islam terjadi suatu peristiwa penting yaitu saat kaum kafir quraisy bernegosiasi terkait pelaksanaan peribadatan. Mereka mengusulkan untuk beribadah secara bersama-sama hal ini berarti mereka berupaya mencampuradukkan Islam dengan keyakinan yang mereka anut. Kemudian Nabi Muhammad SAW menegaskan untuk bahwa jika dalam keyakinan maka harus beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa saling mengganggu, sehingga pertikaian dengan alasan perbedaan keyakinan tidak akan terjadi (Wahyuddin & Hanafi, 2020).

Sejak Islam diturunkan pada masa awal dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara berangsur-angsur umat Islam

bertambah jumlahnya. Sehingga pada akhirnya komunitas umat Islam terbentuk, dimulai dari keluarga dan kerabat dekat Nabi yang menerima Islam kemudian mulai diterima oleh sebagian masyarakat. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah sekitar 13 tahun, komunitas umat Islam yang terbentuk dengan berbagai keragaman budaya, sehingga ajaran Islam pun telah mulai akulturatif dengan budaya masyarakat pemeluknya itu. Selanjutnya, dakwah Nabi di Madinah yang berlangsung sekitar 10 tahun dilakukan secara terang-terangan, karena keadaan masyarakat Madinah pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia, yang juga multi-etnis, multi-kultur, dan multi-agama (Abdurahman, 2016).

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat peristiwa multikultural dalam sejarah Nabi Muhammad SAW meliputi : *Pertama*, peristiwa *Takhkim* yang terjadi sebelum masa kenabian yaitu ketika seluruh kabilah di Mekah bergotong-royong merenovasi ka'bah yang rusak karena dilanda banjir, konflik mulai terjadi saat akan meletakkan *Hajar Aswad* di tempat semula kemudian Nabi hadir sebagai penengah diantara kabilah yang berkonflik dengan menawarkan solusi untuk meletakkan batu tersebut di atas sebuah kain, dan setiap pimpinan kabilah mengangkatnya bersama-sama sampai di tempat peletakkan Nabi yang dipercaya untuk meletakkan *Hajar Aswad* di tempat semula.

Terdapat nilai multikultural yang Nabi terapkan pada masalah ini yaitu nilai keadilan dan persamaan, yang terbukti dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan baik. *Kedua*, *Baiat Aqobah*, yaitu perjanjian yang dilakukan Nabi dengan masyarakat yang masuk Islam, perjanjian ini dibuat untuk mengikat persaudaraan sesama muslim sebagai titik awal untuk bergerak mendakwahkan Islam. *Ketiga*, Piagam Madinah merupakan perjanjian damai sekaligus draf perundang-undangan yang mengatur kemajemukan komunitas dan berbagai sektor kehidupan di Madinah sebagai upaya Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban di Madinah.

Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh yang menyerukan perdamaian antar umat. Nabi pemerhati kaum budak dan sangat menegakkan hak asasi manusia. Perbedaan dan keragaman dalam masyarakat pada masa Nabi disikapi dengan baik melalui nilai-nilai pendidikan multikultural. Dengan misi menciptakan masyarakat yang

kondusif dalam keragaman yang begitu kompleks. Pendidikan multikultural merupakan strategi praktis dalam rangka mengenalkan pluralisme budaya pada ranah pendidikan. Nilai-nilai pendidikan multikultural dalam sejarah Nabi Muhammad adalah upaya ilmiah untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antar umat beragama.

Berdasarkan fakta sejarah, penerimaan dan sikap menghargai kondisi masyarakat yang pluralis juga menerapkan nilai toleransi menjadi pondasi awal dibangunnya Madinah. Penanaman nilai toleransi dan pluralism pada peserta didik dapat melalui kegiatan pembelajaran dengan menjelaskan proses dibangunnya masyarakat Madinah dengan menelusuri bukti sejarah yaitu piagam Madinah (Ambarudin, 2016).

Piagam Madinah merupakan langkah kebijakan yang diambil dan dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah saat berhadapan dengan masyarakat yang pluralis dan multikultur. Kebijakan ini sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat perbedaan di tengah masyarakat. Piagam Madinah juga merupakan cara Nabi untuk menyatukan masyarakat yang plural dalam satu kesatuan, langkah ini yang kemudian menjadi contoh dan diikuti sebagai pijakan pembentukan masyarakat sebelum konsep-konsep pembentukan Negara di dunia hadir.

Pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW. di madinah, Nabi merupakan pelopor multikulturalisme terlihat dari kebijakan reformatifnya dalam membangun dinamika sosial masyarakatnya yang hidup dalam kedamaian. Padahal masyarakat Madinah sangatlah plural, perbedaan suku, budaya, keyakinan, bahkan perbedaan nasab merupakan suatu realitas yang ada saat itu. Maka persetujuan bersama untuk hidup secara damai tersebut merupakan manifestasi dari kesepakatan bersama yang dikenal dengan “Piagam Madinah”.

Perkembangan multikulturalisme pada masa Nabi Muhammad SAW dilanjutkan periode selanjutnya yaitu masa pemerintahan *Khulafaurrasyidin*, selain dilatarbelakangi perubahan sistem sosial-politik pada masanya juga bertambahnya jumlah kaum muslim yang semakin tersebar di berbagai wilayah baik di Arab dan sekitarnya. Maka kebijakan yang diterapkan Empat Khalifah pada periode ini menunjukkan perbedaan arah dalam mengembangkan Islam maupun kehidupan umat

Islam saat dihadapkan dengan situasi masyarakat serta kultur yang beragam. Kemudian Islam semakin berkembang pesat pada zaman Dinasti Umayyah di Damaskus (661-750) dan Dinasti Umayyah di Andalusia (750-1031), perkembangan tersebut yang pada akhirnya melahirkan aliran-aliran keyakinan maupun kelompok muslim pada ranah kebudayaan berasal dari suku yang beranekaragam (Abdurahman, 2016).

Nilai-nilai multikultural sejalan dengan konsep ajaran Islam tentang prinsip demokrasi (*al-musyawahah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan keadilan (*al-'adl*) telah berhasil diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengelola keragaman kelompok pada masyarakat Madinah yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Piagam ini menetapkan seluruh pendidikan Madinah memperoleh status yang sama atau persamaan dalam kehidupan.

### ***Konsep Dasar Pendidikan Islam Multikultural pada Masa Dinasti Abbasiyah***

Pendiri Dinasti Abbasiyah adalah keturunan dari Abbas yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah al-Suffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah al-Abbas. Dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 4 periode sejarah. Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah kebijakan dan pola kepemimpinan para khalifahnya mengalami perbedaan hal ini karena disesuaikan dengan kondisi sosial, politik dan budaya pada masa tersebut. Dinasti Abbasiyah berhasil menciptakan peradaban dan menorehkan prestasi gemilang pada periode I (132 H/750 M-232 H/847 M). Keberhasilan tersebut dapat diraih karena para khalifah Dinasti Abbasiyah periode I terkenal dengan pribadi yang kuat, khalifah menjadi pusat kekuasaan politik juga agama. Masyarakat hidup dengan makmur sat apusat pemerintahannya di kota Baghdad (Wahyuningsih, 2014).

Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa khalifah Harun Al-Rasyid (786 M-809 M) kemudian dilanjutkan khalifah Al-Ma'mun (813 M-833 M) yang merupakan anak dari Harun Al-Rasyid. Khalifah Harun Al-Rasyid dan Al-Ma'mun menggunakan harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial seperti: lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, pusat kajian ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta

kesastraan berada pada masa keemasan ini. Khalifah Al-Ma'mun merupakan khalifah yang sangat mencintai ilmu, hal ini dibuktikan dengan kegemarannya mendirikan banyak sekolah (Abdurahman, 2016). Bukti sejarah terpenting yang Al-Ma'mun wariskan adalah pembangunan *Bait al-Hikmah*, yang merupakan pusat penerjemahan juga berfungsi sebagai pendidikan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Baghdad sebagai pusat pemerintahan pada masa ini menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya.

Jumlah khalifah yang memerintah pada masa Dinasti Abbasiyah yaitu 37 khalifah. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa khalifah ketiga al-Mahdi, dan khalifah ke sembilan, al-Watsiq, dan khususnya pada masa Harun al-Rasyid dan anaknya al-Makmun. Selama kekuasaan mereka tersebut, peradaban Islam sangat berkembang. Pada masa Harun Al-Rasyid kondisi politik di awal pemerintahannya sangat tidak stabil sehingga mengganggu perkembangan lembaga pendidikan yang dibangunnya. Namun Harun menerapkan kebijakan yaitu untuk menyesuaikan kondisi ini dengan menerapkan asas persamaan pada semua provinsi di bawah pemerintahannya dan tidak ada praktik diskriminasi maupun hak istimewa bagi suatu kelompok etnis tertentu (Amstrong, 2003). Pemerintahannya menerapkan sikap persamaan derajat dan tidak ada diskriminasi pada golongan tertentu, sehingga siapa saja yang berkompeten dapat bekerja di kerajaan atau pemerintahan.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut maka sebenarnya pada masa Dinasti Abbasiyah (750-1258). Multikulturalisme mulai berkembang melewati batasan keragaman pada masyarakat Arab asli, keragaman kultur ini terjadi karena adanya hubungan antara budaya luar Islam dan luar budaya Arab. Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah kebudayaan Islam bertemu dengan kebudayaan Arab, Persia, Romawi, juga kebudayaan India. Para khalifah memiliki tujuan untuk memperkenalkan budaya luar Arab ke dalam masyarakat muslim melalui kegiatan penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berasal dari peradaban-peradaban besar itu. Kecenderungan multikulturalisme juga bertolak dari keterbukaan para khalifah untuk menerima pengaruh kebudayaan luar Arab, disamping itu keterlibatan

masyarakat luar Arab sendiri bagi proses pembentukan serta pengembangan kebudayaan Islam (Abdurahman, 2016).

Sikap keterbukaan terhadap keragaman etnis dan kultur serta agama pada masa Harun Al-Rasyid dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Al-Ma'mun yang terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta terhadap ilmu sehingga pendidikan pada masa itu sangat maju dan berkembang pesat. Konsep dasar pendidikan multikultural telah ada pada masa pemerintahan khalifah Al-Ma'mun. Terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan konsep dasar pendidikan multikultural di lembaga *Bayt al-Hikmah* dengan institusi lain. Adapun penerapan konsep dasar pendidikan multikultural di *Bayt al-Hikmah* bersifat eksternal dan umum, yaitu semua orang bebas berekspresi, terbuka, toleransi dan kesetaraan dalam mencari ilmu, menerjemahkan, beribadah, bekerja, dan melakukan segala kegiatan yang bermanfaat.

Penerapan konsep pendidikan multikultural selain di *Bayt al-Hikmah* lebih bersifat internal dan khusus yang lebih menekankan pada aspek keragaman dan kesederajatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Berikut implementasi nilai multikultural pada institusi selain *Bayt al-Hikmah* yaitu: (Muhtifah, 2008)

1. Kebebasan dan kesetaraan. Kebebasan ini meliputi pemilihan materi ajar, pendidik serta kelompok belajar sesuai yang diinginkan oleh peserta didik.
2. Keadilan bagi kelompok minoritas, meliputi keadilan bagi peserta didik yang kurang mampu atau yatim. Pemerintah mengupayakan untuk memberikan bantuan berupa pendidikan gratis, perlengkapan alat tulis, sampai tunjangan hidup yang diberikan setiap bulan, dana bantuan ini bersumber dari lembaga wakaf.
3. Keadilan bagi peserta didik. Pendidik bersikap adil dan tidak membeda-bedakan atau mengistimewakan peserta didik tertentu. Semua peserta didik diperlakukan sama meskipun berasal dari latarbelakang yang berbeda-beda (Saihu, 2019).

Penerapan pendidikan Islam yang multikultural ini turut berkontribusi dalam menciptakan peradaban bangsa juga mampu mengantarkan Islam pada masa keemasan kontribusi tersebut antara lain seperti:

1. Asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat terjalin dengan baik.
2. *Bayt al-Hikmah* dikelola dengan suasana keberagaman, kesederajatan, serta sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama yang ada pada masa itu khususnya Kristen juga berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan juga ilmu agama.
3. Peserta didik bebas untuk memilih bidang keilmuan serta pelajaran yang diinginkan. Peserta didik juga diberikan kebebasan untuk memilih pendidik hal ini dalam rangka untuk menciptakan komunikasi efektif antara pendidik dan peserta didik dan nilai-nilai toleransi antar keduanya berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan lahirnya imam-imam madzhab (Muhtifah, 2008).

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan multikultural pada institusi-institusi pendidikan Islam menjadi faktor pendukung tercapainya masa kejayaan Islam di Masa Dinasti Abbasiyah yang ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan pada zaman itu. Nilai-nilai multikultural yang diterapkan adalah nilai toleransi, persamaan, saling terbuka, kebebasan, keadilan, menghargai keragaman dan demokrasi. Pesatnya peradaban dan perkembangan ilmu juga didukung oleh tokoh-tokoh pendidik yang memiliki visi dan misi yang berbasis multikultural, seperti:

1. Khalifah al-Ma'mun (813-833 M) Nama asli al-Ma'mun adalah Abdul Abbas Abdullah al-Ma'mun (783-833 M). Seorang khalifah Abbasiyah, putra dari Harun al-Rasyid. Merupakan khalifah yang sangat toleran terhadap masyarakat yang multi agama khususnya yang beragama kristen, serta menyikapi dengan baik kondisi muti kultur, al-Ma'mun menghargai kultur yang berbeda-beda seperti Rusia, Pagan dan lain-lain. Oleh karena itu al-Ma'mun disebut sebagai tokoh pendidikan multikultural.
2. Muhammad ibn Musa al-Hawarizmi (780-850 M)  
Ahli aljabar dan astronomi, direktur perpustakaan *Bayt al-Hikmah* atau pusat studi dan riset astronomi dan matematika. Beliau seorang pendidik multikultural karena ikut menciptakan suasana bebas, terbuka, toleran, dan sederajat dalam mengelola *Bayt al-*

*Hikmah* dan upaya menerjemahkan buku-buku warisan Hellenisme dari Yunani kedalam bahasa Arab.

### 3. al-Kindi (809-866 M)

Ilmuwan dan filsuf muslim pertama yang dikenal sebagai pendidik multikultural karena dikenal sebagai sosok yang humanis dan orang yang pertama kali mengajak kaum muslimin untuk hidup saling memahami dan menyelaraskan pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan* (Surabaya: Prenada Media, 2015).

Model pendidikan Islam multikultural meliputi beberapa aspek penting yaitu aspek kelembagaan, desain materi, pendidik, metode serta evaluasi yang diintegrasikan dengan konsep multicultural (Ansori, 2018; Thoyib, 2016). Berdasarkan analisis historis implementasi pendidikan multi kultural masa Abbasiyah, para khalifah Dinasti Abbasiyah selain sebagai pemimpin juga teladan dan panutan masyarakat telah memberikan teladan dalam mengaplikasikan pendidikan Islam multikultural yang baik.

Sejarah membuktikan khususnya pada masa pemerintahan khalifah al-Ma'mun terlihat pada aspek kelembagaan, penyelenggaraan institusi-institusi pendidikan diterapkan metode pengajaran yang menanamkan nilai-nilai multikulturalisme yaitu kebebasan, kesetaraan/kesederajatan dan keadilan pada peserta didik dan pendidik khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

## **PENUTUP**

Multikulturalisme pada masa Dinasti Abbasiyah (750-1258) mulai berkembang, hal ini karena keterbukaan khalifah dalam menerima kebudayaan di luar Arab juga peran dari masyarakatnya. Konsep dasar pendidikan multikultural telah ada pada masa pemerintahan khalifah Al-Ma'mun. Penerapan konsep dasar pendidikan multikultural di *Bayt al-Hikmah* bersifat eksternal dan umum yaitu semua orang bebas berekspresi, terbuka, toleransi dan kesetaraan dalam mencari ilmu, menerjemahkan, beribadah, bekerja, dan melakukan segala kegiatan yang bermanfaat. Sedangkan selain di *Bayt al-Hikmah* lebih bersifat internal

dan khusus yang lebih menekankan pada aspek keragaman dan kesederajatan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Praktik pendidikan multikultural ini berdampak besar pada kemajuan peradaban bangsa yaitu terjalannya asimilasi antar bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain, gerakan terjemah yang menghargai multikultural berpengaruh pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebebasan dalam mencari Guru dan menentukan materi dalam proses pembelajaran mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi bukti sejarah jika pendidikan Islam dengan berbasis multikulturalisme mampu membawa Islam pada puncak kejayaan.

Saran peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai strategi, tantangan atau kendala pada praktik pendidikan Islam multikultural pada masa Dinasti Abbasiyah, karena pada penelitian terbatas pada konsep dasar dan model pendidikan Islam Multikultural pada masa Dinasti Abbasiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2016). Fenomena Mutlikulturalisme Dalam Sejarah Islam Klasik. *Thaqafiyat*, 17(1), 1–32.
- Ambarudin, R. I. (2016). Pendidikan multikultural untuk membangun bangsa yang nasionalis religius. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1).  
<https://doi.org/10.21831/civics.v13i1.11075>
- Amstrong, K. (2003). *Sejarah Islam*. Bandung: Mizan.
- Ansori, M. (2018). Model Pendidikan Islam Betbasis Multikultural. *Al-Yasini*, 3(2), 118–132. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/3510>
- Harto, K. (2014). Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(2), 411–431. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.122>
- Hasanah, U., & Hasanah, I. F. (2021). Internalisasi Pemahaman Moderasi Multikultural Dalam Pendidikan Islam Masa New Normal. *Atanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 12(1), 32–50.

- Heriadi, H. (2020). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Multikultural. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 14(1), 87–102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v14i1.247>
- Ifendi, M. (2020). Dinasti Abbasiyah: Studi Analisis Lembaga Pendidikan Islam. *FENOMENA*. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i2.2269>
- Informasi Indonesia, P. (2017). Suku Bangsa. Retrieved from Indonesia.go.id website: <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>
- Iqbal, I. (2015). *Peranan Dinasti Abbasiyah terhadap Peradaban Dunia*. 11, 224–246.
- Khairuddin. (2018). Pendidikan Pada Masa Dinasti Abbasiyah (Studi Analisis tentang Metode, Sistem, Kurikulum dan Tujuan Pendidikan). *Ittihad*, II(1), 98–109.
- Khotimah, K., & Januarizal, J. (2017). Pendidikan Islam Berbasis Multikultural. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 9(2), 114–134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v9i2.4327>
- Kiki Hakiki. (2012). Mengkaji Ulang Sejarah Politik Kekuasaan Dinasti Abbasiyah. *Jurnal TAPIS*, 8(1), 113–134.
- Lasijan, L. (2014). Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam. *Jurnal TAPIS: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(2), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v10i2.1610>
- Ma'zumi, M., Syihabudin, S., & Najmudin, N. (2019). Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunah: Kajian Atas Istilah Tarbiyah, Taklim, Tadris, Ta'dib dan Tazkiyah. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 6(2), 194–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/t.v6i2.21273>
- Mahroes, S. (2015). Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah Perspektif Sejarah Pendidikan Islam. *Jurnal TARBIYA*.
- Maryamah, M. (2017). Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 47–65.

- Muhtifah, L. (2008). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam : Konsep Dasar Pendidikan Multikultural di Institusi Pendidikan Islam Zaman al-Ma'mun (813-833 M)*. Jakarta: Kencana.
- Mustaqim, M., & Mustaghfiroh, H. (2013). Pendidikan Islam Berbasis Multikulturalisme. *Addin*, 7(1), 105–128. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/53167-ID-pendidikan-islam-berbasis-multikulturali.pdf>
- Novayani, I. (2017). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Multikultural). *Tadrib*, 3(2), 235–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/Tadrib.v3i2.1795>
- Nunzairina, N. (2020). Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, dan Kebangkitan Kaum Intelektual. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 93. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4382>
- Rois, A. (2013). Pendidikan Islam Multikultural: Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(2). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.2.301-322>
- Saihu, S. (2019). Pendidikan Islam Multikulturalisme. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 1(2), 170–187. <https://doi.org/10.36670/alamin.v1i2.8>
- Sopiah. (2017). Pendidikan Multikultural dalam pendidikan islam. *EDUSIANA: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(1), 13–23. <https://doi.org/10.30957/edusiana.v4i1.3>
- Suriana. (2017). Refleksi-Introspeksi: Tantangan Dan Penopang Kemajuan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Faculty of Tarbiyah and Teacher Training of State Islamic Institute of Lhokseumawe, Vol 8 No 2(2)*, 107–121.
- Suwito, S. (2015). *Sejarah Sosial Pendidikan*. Surabaya: Prenada Media.
- Thoyib, M. (2016). *Model Pengembangan Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Wahyuddin, W., & Hanafi, H. (2020). Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islam. *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 714–722. <https://doi.org/10.32505/ikhtibar.v7i1.610>

- Wahyuningsih, S. (2014). Implementasi Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah Dan Pada Masa Sekarang. *Jurnal Kependidikan*, 2(2), 109–126. <https://doi.org/10.24090/jk.v2i2.555>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

